



KEMENTERIAN KEUANGAN

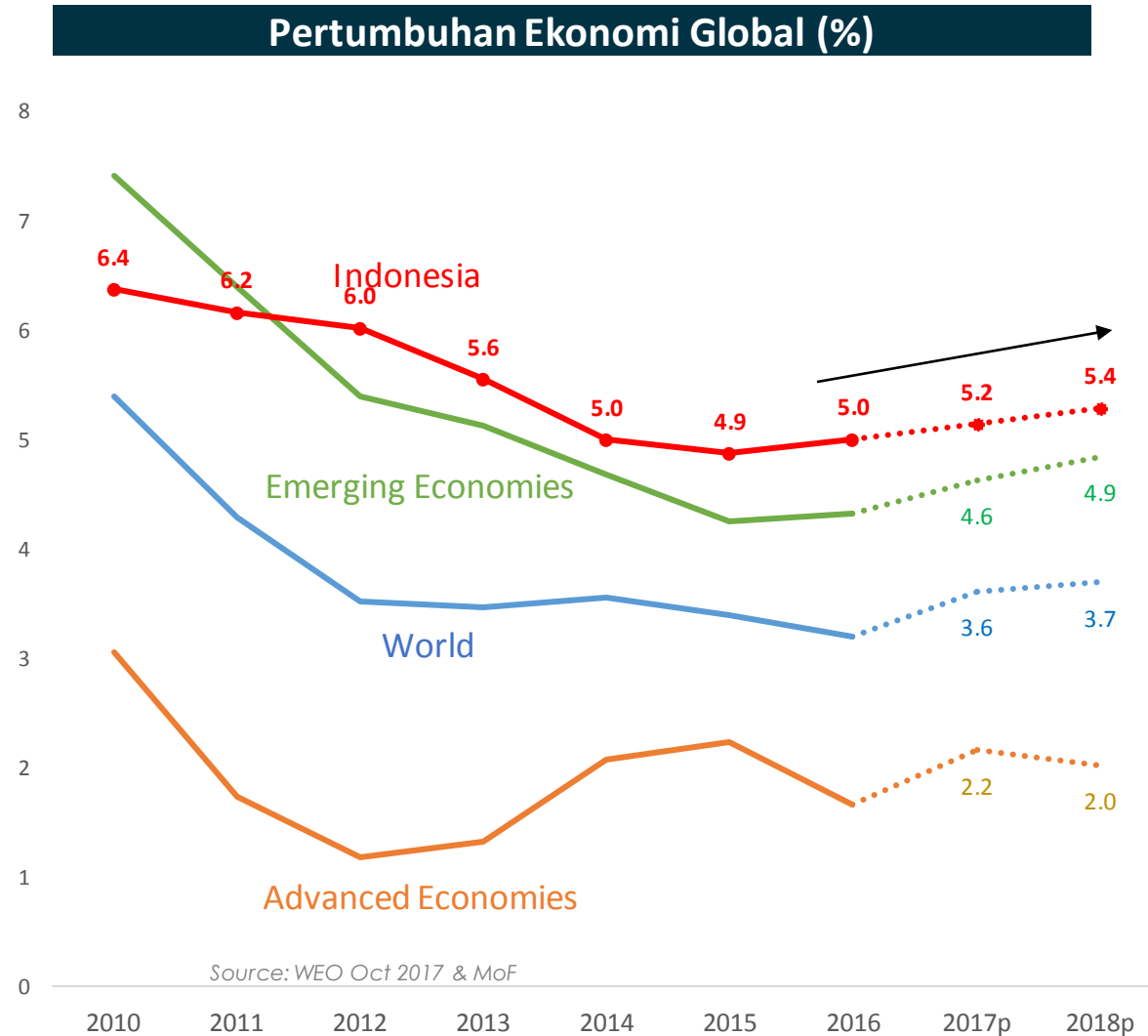
APBN TAHUN 2018

Konferensi Pers

25 Oktober 2017



Perekonomian Dunia Diperkirakan Terus Tumbuh, Meskipun Masih Terdapat Beberapa Tantangan Dan Risiko



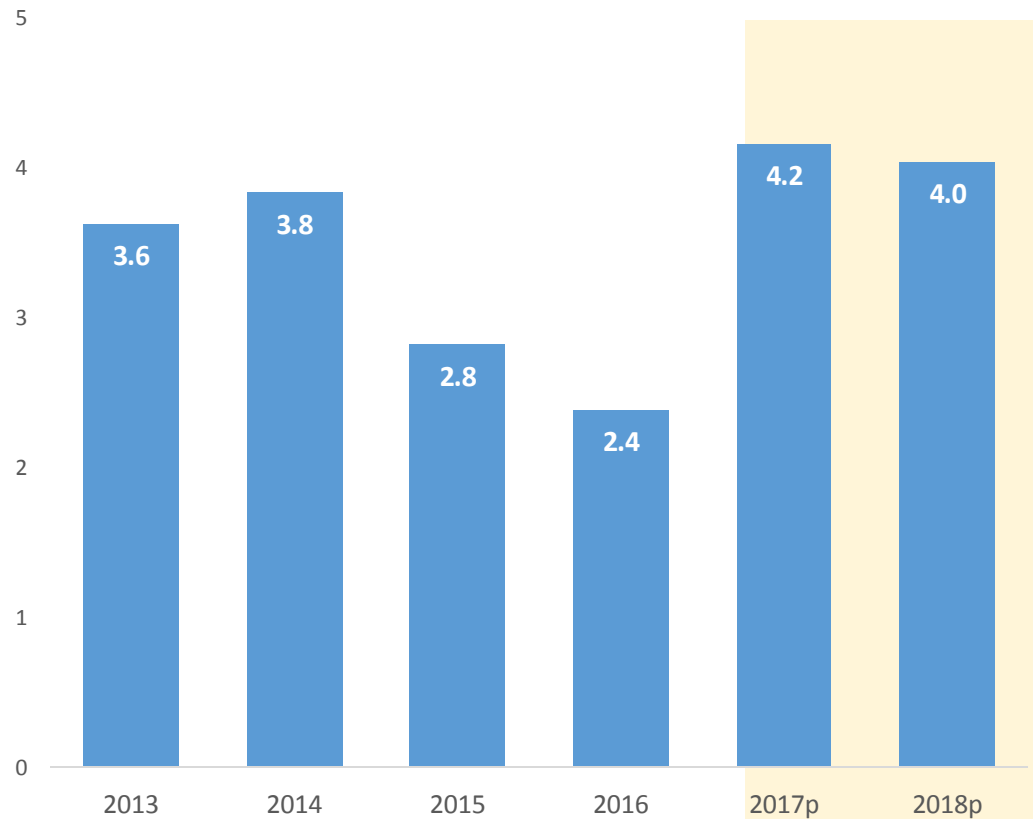
Tantangan & Risiko

- China economic rebalancing
- Low Commodity Prices
 - Monetary Normalisation
- Ageing Population
 - Protectionism
- Security & Geopolitic
 - Climate Change & Natural Disaster

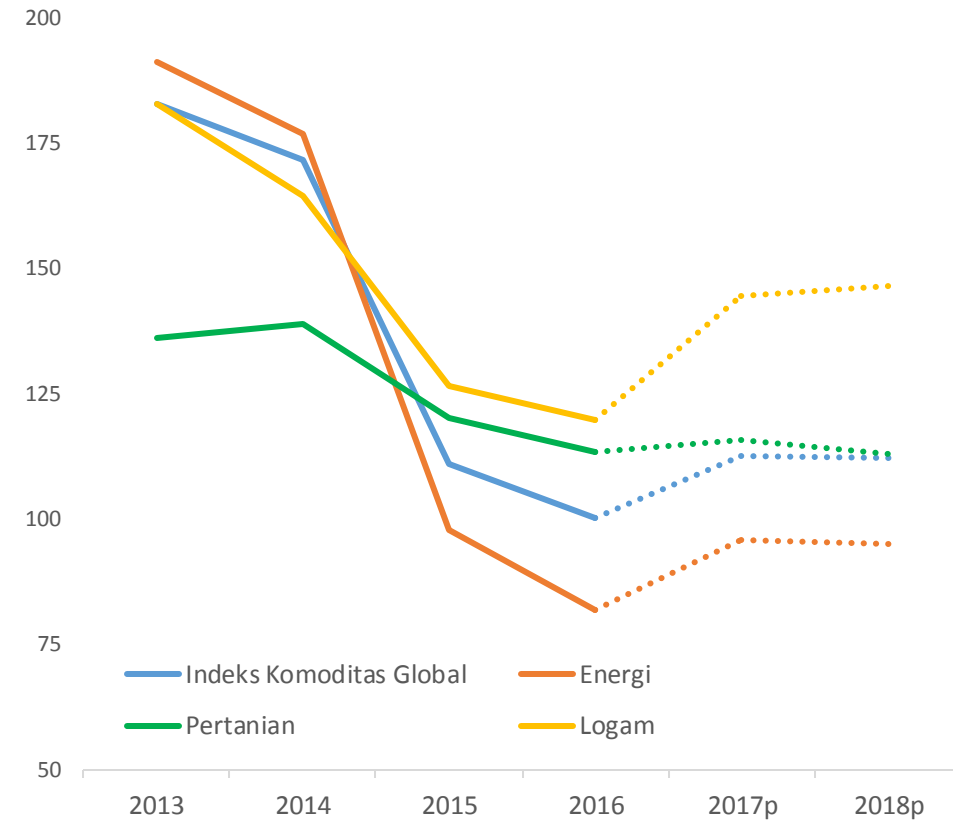
Volume Perdagangan dunia dan harga komoditas diperkirakan akan meningkat seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia.

Namun di 2018 diperkirakan melambat seiring dengan berlanjutnya moderasi Tiongkok dan bayangan proteksionisme.

Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%)

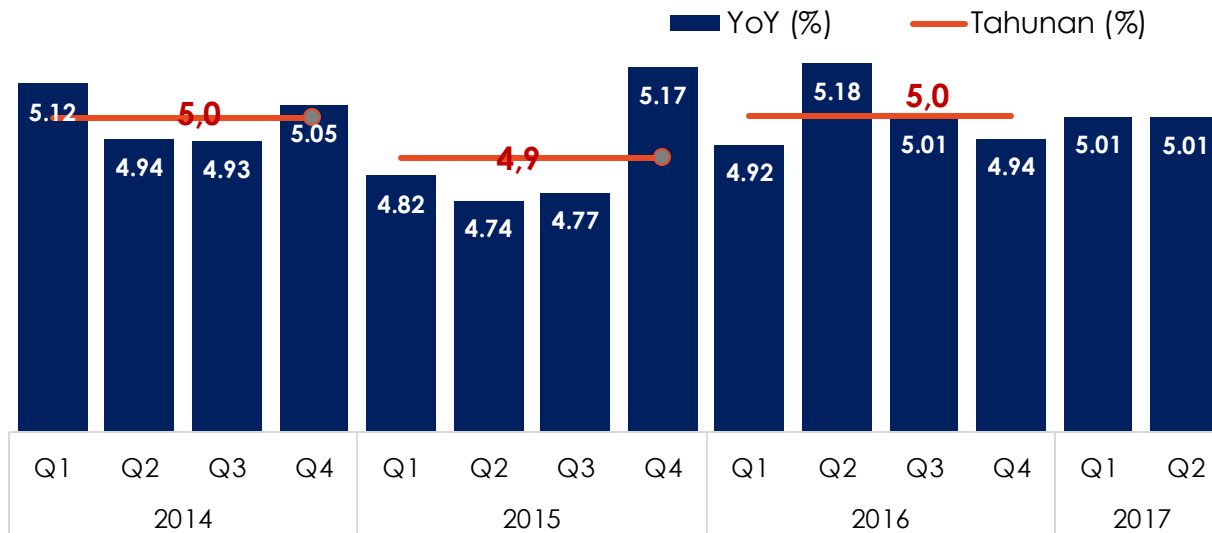


Indeks Komoditas Global



Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2017 Sehat Dan Stabil

SNAPSHOT PERTUMBUHAN SEMESTER 1 2017



Pertumbuhan PDB per Sektor (%, YoY)	2016		2017		
	S1	Y	Q1	Q2	S1
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.5	3.3	7.1	3.3	5.1
Pertambangan dan Penggalian	1.2	1.1	-0.6	2.2	0.8
Industri Pengolahan	4.7	4.3	4.2	3.5	3.9
Konstruksi	5.9	5.2	5.9	7.0	6.5
Perdagangan Besar dan Eceran	4.1	3.9	5.0	3.8	4.4
Transportasi & Pergudangan	7.4	7.7	8.0	8.4	8.2
Informasi dan Komunikasi	8.5	8.9	9.1	10.9	10.0
Jasa Keuangan dan Asuransi	11.4	8.9	6.0	5.9	6.0
Jasa-Jasa Lainnya	5.7	4.8	4.0	3.4	3.7
PDB	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0

Permintaan **domestik** masih menjadi motor

Konsumsi RT tumbuh **5,0%**

PMTB tumbuh **5,1%**

Kinerja perdagangan internasional positif, ekspor tumbuh **5,8%** dan impor tumbuh **2,8%**

Sektor primer tumbuh baik, dengan sektor pertambangan yang mencatatkan pertumbuhan positif

Sektor konstruksi tumbuh tinggi 6,5%, sejalan dengan akselerasi infrastruktur

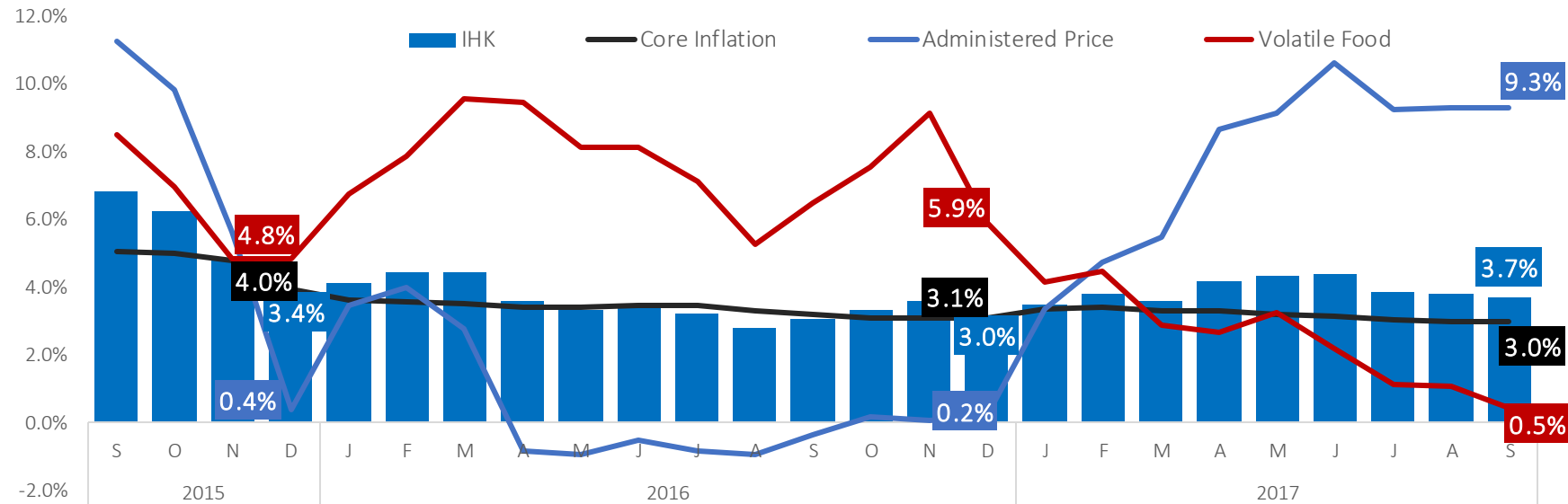
Sektor jasa melanjutkan tren peningkatan terutama transportasi dan informatika, yang juga terdorong oleh percepatan infrastruktur

Sektor industri pengolahan tumbuh melambat 3,9%, menguatkan perlunya revitalisasi

Inflasi Terkendali

Harga pangan bergejolak dapat dikendalikan dan mengurangi tekanan inflasi

Komponen Pembentuk Inflasi 2017 (yoy)



Sumber: BPS, diolah

	Sept' YoY	Januari – September Ytd	Rata-rata YoY
IHK	3,72%	2,66%	3,91%
Core Inflation	3,00%	2,51%	3,27%
Administered Price	9,32%	7,51%	7,77%
Volatile Food	0,47%	-1,56%	2,47%

Selama Januari hingga September 2017

- Berakhirnya penyesuaian tarif listrik di akhir semester I 2017 menyebabkan tekanan inflasi **administered price** sedikit menurun.
- Core inflation** masih dapat terjaga pada kisaran 3% (yoy).
- Inflasi **volatile food** masih dapat terjaga pada tingkat yang rendah dengan rata-rata Januari-September 2017 mencapai 2,47% (yoy).
 - Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil

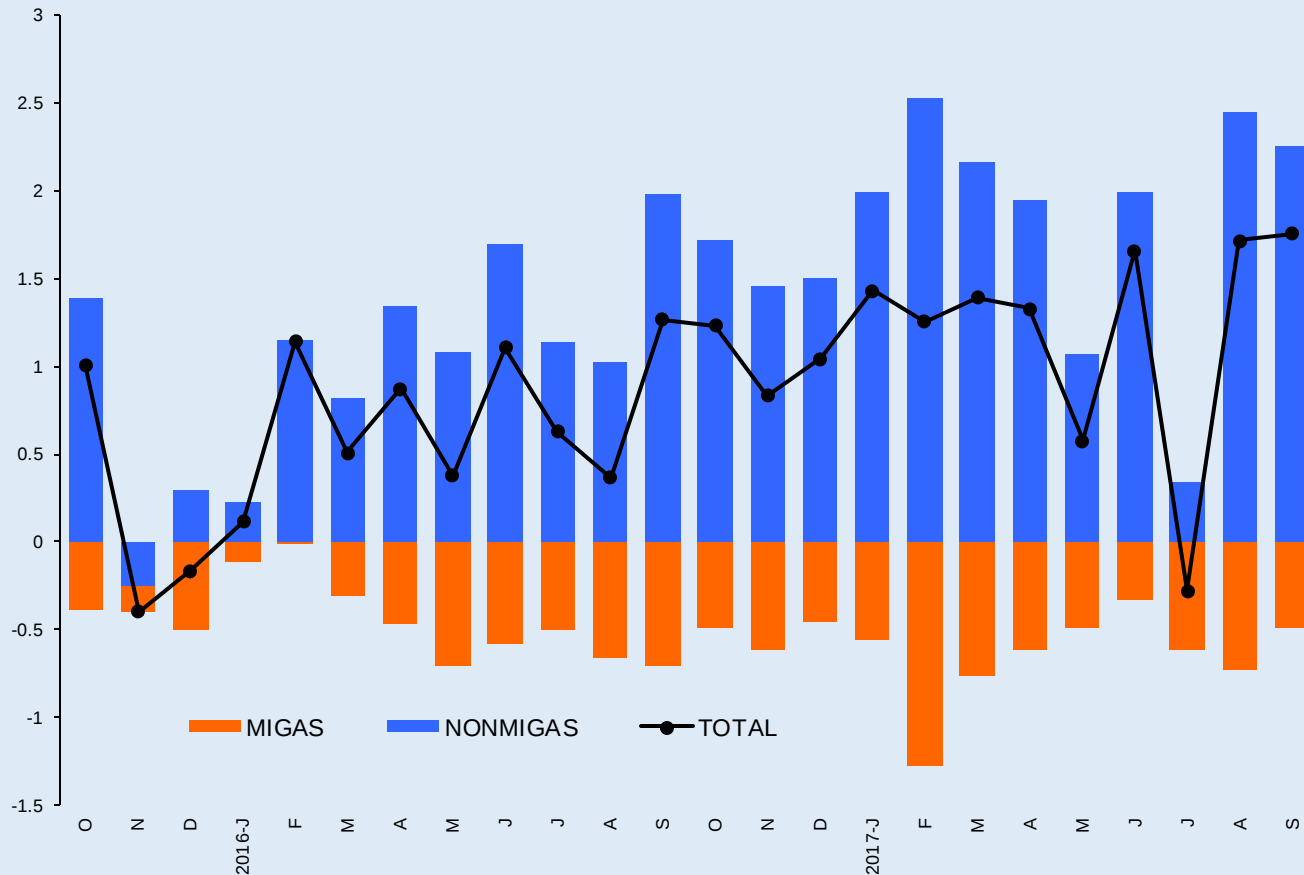
Kinerja sektor eksternal sepanjang 2017 terus menunjukkan perbaikan

Neraca Perdagangan Mencatatkan Surplus

2015 Surplus
USD 7,6 Bn

2016 Surplus
USD 8,8 Bn

Jan – Sep 2017
Surplus USD 10,9 Bn

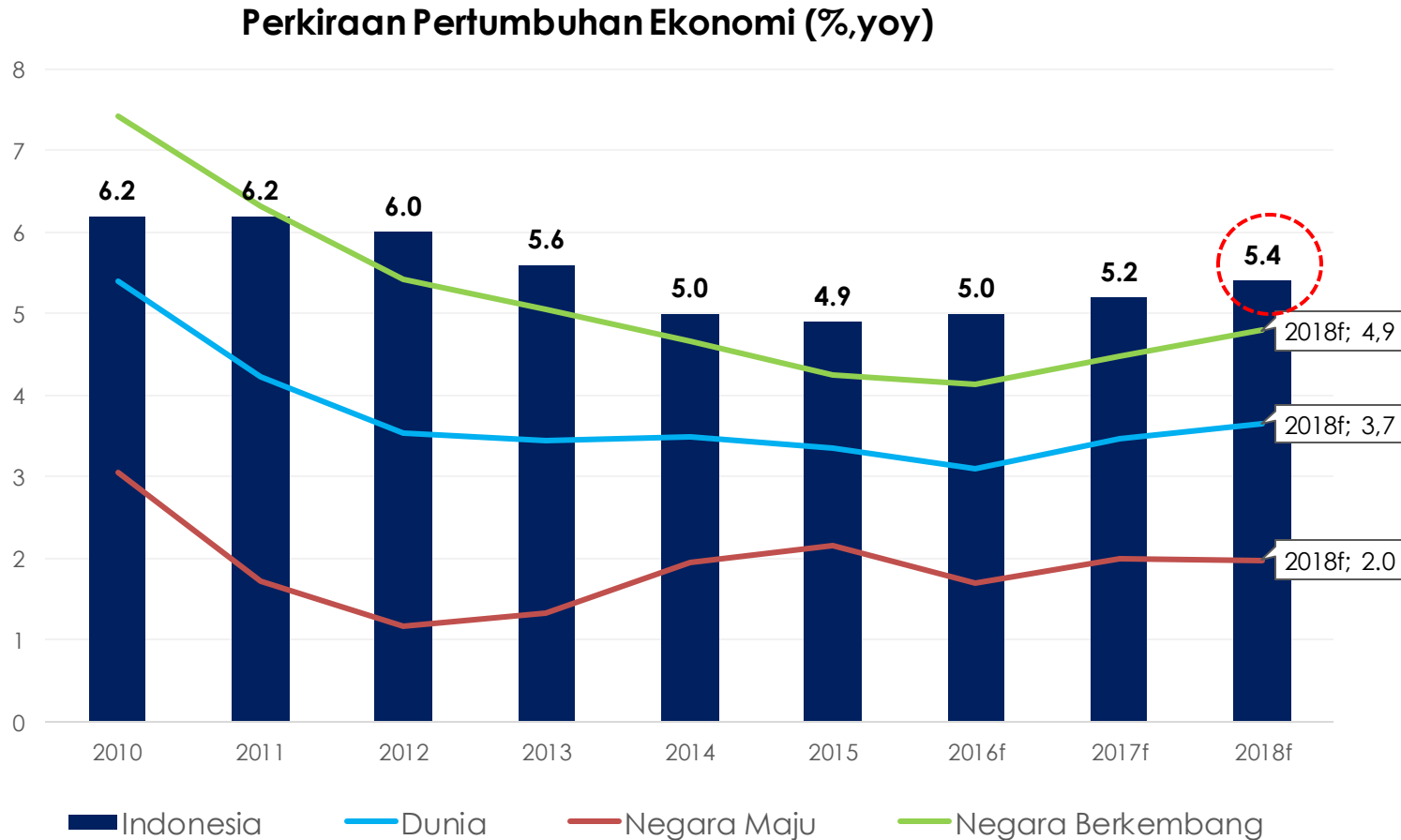


Negara Tujuan Ekspor Non Migas Utama di 2017

1. Tiongkok	13,0%
2. Amerika Serikat	11,5%
3. Jepang	9,5%
4. India	9,1%
5. Singapura	6,0%

- Seiring dengan perbaikan ekonomi negara mitra dagang utama dan perbaikan harga komoditas, **kinerja perdagangan internasional Indonesia meningkat.**
- Neraca Perdagangan **September** 2017 tercatat mengalami surplus sebesar USD1,76 miliar, tercatat sebagai **surplus tertinggi** sejak tahun 2012.
- Secara kumulatif, Neraca Perdagangan Indonesia tercatat surplus sebesar USD10,87 miliar, **melampaui surplus setahun** di tahun 2016 yang sebesar USD9,53 miliar.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ke Depan Sangat Baik dan Berpotensi di atas Tren Global



Sumber: WEO Oct 2017 & Kemenkeu

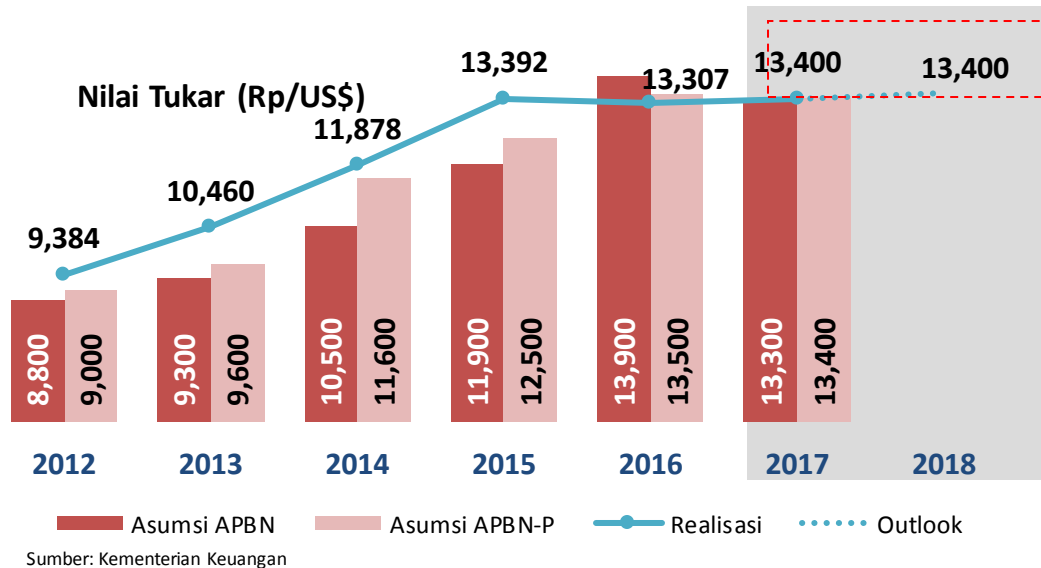
FAKTOR PENDORONG PERTUMBUHAN:

Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menemukan momentum pemulihan, di saat tren global masih melambat

Ke depan, pertumbuhan akan melanjutkan tren peningkatan a.l. didukung sektor domestik yang sehat dan dukungan pemerintah pada aktivitas yang menunjang produktivitas (e.g. infrastruktur)

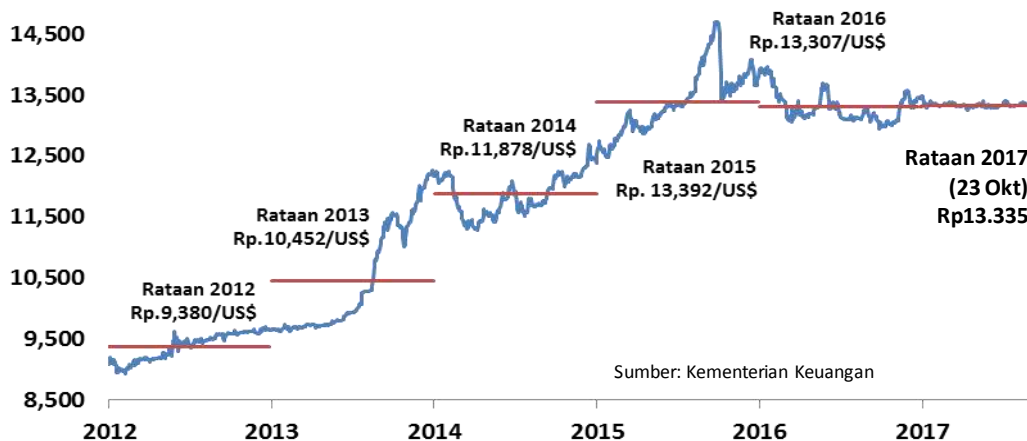
Risiko perekonomian global masih harus terus diwaspadai agar sektor eksternal kondusif dan *confidence* terjaga

NILAI TUKAR rupiah diperkirakan stabil pada level 13.400/US\$



Faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

- Kinerja perekonomian nasional yang relatif baik: akselerasi proyek infrastruktur, keberhasilan program pengampunan pajak, terjaganya tingkat inflasi, positifnya neraca pembayaran, terkendalinya defisit transaksi berjalan, dan kuatnya cadangan devisa.
- Kebijakan stabilitasi nilai Rupiah secara terukur sesuai dengan fundamental ekonomi oleh Bank Indonesia dan penurunan suku bunga acuan BI
- Peningkatan *sovereign rating* ke *investment grade* (BBB-).
- Perbaikan ekonomi AS serta pengurangan *balance sheet the Fed*.
- Masih diberlakukannya *quantitative easing* oleh ECB dan BoJ,
- Pelaksanaan kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan baru (proteksionisme),
- *Rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara AS dengan Korea Utara dan krisis Qatar.



Berbagai Pengakuan atas Reformasi Ekonomi & Struktural diperoleh

Dari perbaikan *creditworthiness*, *doing business*, kepercayaan pada pemerintah, hingga daya saing

Ease of Doing Business 2017

naik

15

peringkat

Posisi Indonesia naik dari 106 menjadi 91, dan Indonesia masuk dalam jajaran *Top Improvers*.

Saat ini posisi Indonesia berada di atas India, Brazil, dan Philippines

Investment Grade dari Standard and Poor's

BBB-

Kini Indonesia sudah mendapat peringkat *investment grade* dari seluruh lembaga rating: S&P, Moody's dan Fitch.

Galup World Poll

#1

Indonesia bersama dengan Swiss meraih predikat negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi kepada Pemerintah

Global Competitiveness Index 2017-2018

naik

5

peringkat

Posisi Indonesia naik dari 41 menjadi 36.

9 dari 12 pilar penilaian mendapatkan kenaikan skor antar lain: *Institution, Infrastructure, macroeconomic, health and primary education, technological readiness, business sophistication*

Indikator Ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan 2018

	APBN 2017	Realisasi s.d Sep 2017	RAPBN 2018	APBN 2018
 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,01*	5,4	5,4
 Inflasi (% yoy)	4,3	3,7	3,5	3,5
 Nilai Tukar (Rp/USD)	13.400	13.331	13.500	13.400
 Suku Bunga SPN (%)	5,2	5,0	5,3	5,2
 Harga Minyak (US\$/barrel)	48	48,9	48	48
 Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	815	794,2**	800	800
 Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.150	1.112,8**	1.200	1.200

Cost Recovery dalam APBN 2018 sebesar 10,0 miliar USD, lebih rendah dari RAPBN 2018 sebesar 10,7 miliar USD.

*) Realisasi Semester I

**) Realisasi s.d Agustus

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL 2018

TEMA RKP 2018

Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018

Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan

Produktif

Efisien

Berdaya tahan

Risiko Terkendali

Pendapatan

Optimalisasi:

1. Tax ratio
2. Pengelolaan SDA dan Aset

Belanja

Penguatan kualitas belanja:

1. Peningkatan kualitas belanja modal
2. Efisiensi belanja non prioritas (belanja barang dan subsidi tepat sasaran)
3. Sinergi antara program yang relevan (program perlindungan sosial)
4. Menjaga dan *refocusing* anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan)
5. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal

Pembiayaan

Keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan:

1. Defisit dan rasio utang terkendali dan diupayakan menurun dalam jangka menengah
2. Keseimbangan primer menuju positif
3. Mengembangkan *creative financing*

Indikator kesejahteraan sosial menunjukkan perbaikan

namun akselerasi penurunan kemiskinan & ketimpangan perlu dioptimalkan di tahun 2018

APBN 2018:

Pengentasan Kemiskinan (%)

Target Tingkat Kemiskinan
9,5% - 10%



Penurunan Ketimpangan

Target Indeks gini ratio
0,38



Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Target tingkat pengangguran 5%-5,3%
IPM 71,5



TANTANGAN

- Akses pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi orang miskin
- Perubahan iklim → harga pangan
- Disparitas akses permodalan
- Akses pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi orang miskin
- Kondisi geografis
- Perubahan ekonomi → struktur lapangan kerja
- *Skill mismatch*
- 4th *Industrial Revolution* (automasi, *artificial intelligence*)

FOKUS APBN 2018



EFISIENSI DAN KUALITAS BELANJA PRIORITAS

Pengurangan Kemiskinan
Pengurangan Kesenjangan
Penciptaan Kesempatan Kerja



OPTIMALISASI DAN REFORMASI PENERIMAAN NEGARA

Pajak
Kepabeanan dan Cukai
PNBP



JAGA MOMENTUM EKONOMI DAN KEPERCAYAAN RAKYAT

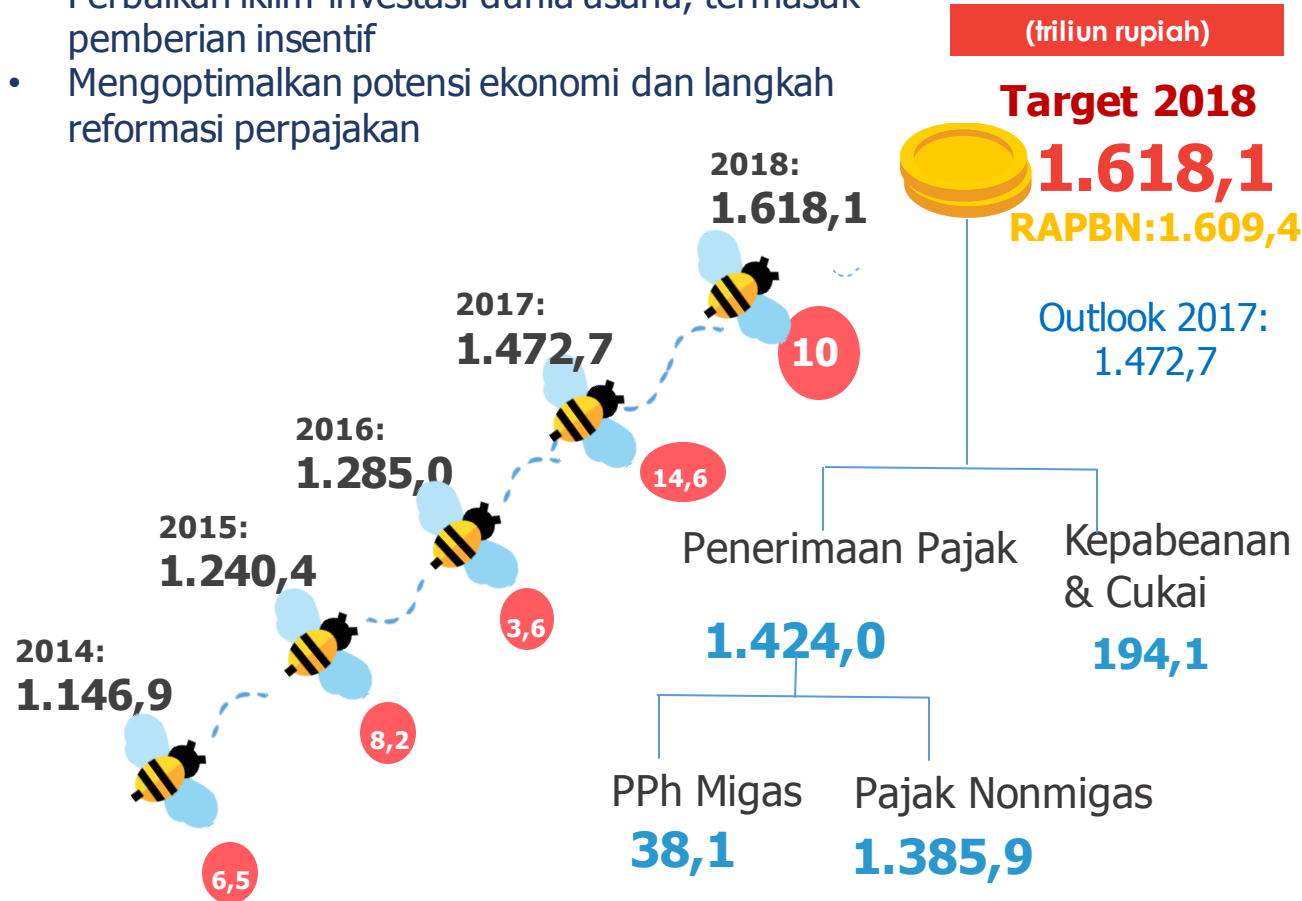
Keberlanjutan Pembiayaan
Utang terkendali
Pertumbuhan lebih baik

Defisit APBN tahun 2018 turun dari tahun sebelumnya

Uraian (triliun Rupiah)	2016	2017	2018		
	Realisasi	Outlook	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.555,9	1.736,1	1.878,4	1.894,7	16,3
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.546,9	1.733,0	1.877,3	1.893,5	16,3
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.285,0	1.472,7	1.609,4	1.618,1	8,7
a.l. a. Pendapatan DJP	1.069,9	1.241,8	1.379,4	1.385,9	6,5
b. Pendapatan DJBC	179,0	189,1	194,1	194,1	0,0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	262,0	260,2	267,9	275,4	7,6
II. PENERIMAAN HIBAH	9,0	3,1	1,2	1,2	0,0
B. BELANJA NEGARA	1.864,3	2.098,9	2.204,4	2.220,7	16,3
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.154,0	1.343,1	1.443,3	1.454,5	11,2
1. Belanja K/L	684,2	769,2	814,1	847,4	33,4
2. Belanja Non K/L	469,8	573,9	629,2	607,1	(22,2)
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	710,3	755,9	761,1	766,2	5,1
1. Transfer ke Daerah	663,6	697,7	701,1	706,2	5,1
a.l. a. Dana Bagi Hasil	90,5	95,4	87,7	89,2	1,54
b. Dana Alokasi Umum	385,4	398,6	398,1	401,5	3,4
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(125,6)	(144,3)	(78,4)	(87,3)	(9,0)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(308,3)	(362,9)	(325,9)	(325,9)	(0,0)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,49)	(2,67)	(2,19)	(2,19)	(0,00)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	334,5	362,9	325,9	325,9	0,0
I. PEMBIAYAAN UTANG	403,0	427,0	399,2	399,2	(0,0)
a. Surat Berharga Negara (neto)	407,3	433,0	414,7	414,5	(0,2)
b. Pinjaman (neto)	(4,3)	(6,0)	(15,5)	(15,3)	0,2
a.l. - Pinjaman Tunai	35,3	20,1	13,5	13,4	(0,1)
- Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman	(68,7)	(65,2)	(70,1)	(69,8)	0,3
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89,1)	(59,7)	(65,7)	(65,7)	0,0
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1,7	(3,7)	(6,7)	(6,7)	0,0
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,7)	(1,0)	(1,1)	(1,1)	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19,6	0,3	0,2	0,2	0,0

Penerimaan Perpajakan naik Rp8,7 T dari RAPBN tahun 2018 (PPN Rp6,5 T. PPh Migas Rp2,2 T)

- Perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif
- Mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan



● Pertumbuhan (%)

Tax Ratio

11,6% PDB
Termasuk SDA migas & tambang

Langkah Perbaikan Perpajakan



Automatic Exchange of Information (AEOI)

- meningkatkan basis pajak
- mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (*Base Erosion Profit Shifting*)



Data Dan Sistem Informasi Perpajakan

up to date dan terintegrasi a.l. melalui *e-filing*, *e-form* dan *e-faktur*.



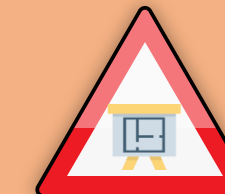
Kepatuhan Wajib Pajak

membangun kesadaran pajak (*sustainable compliance*) a.l. melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, dan *outbond call*.



Insentif Perpajakan

- *tax holiday* dan *tax allowance*
- reviu kebijakan *exemption tax* pada beberapa barang kena PPN.



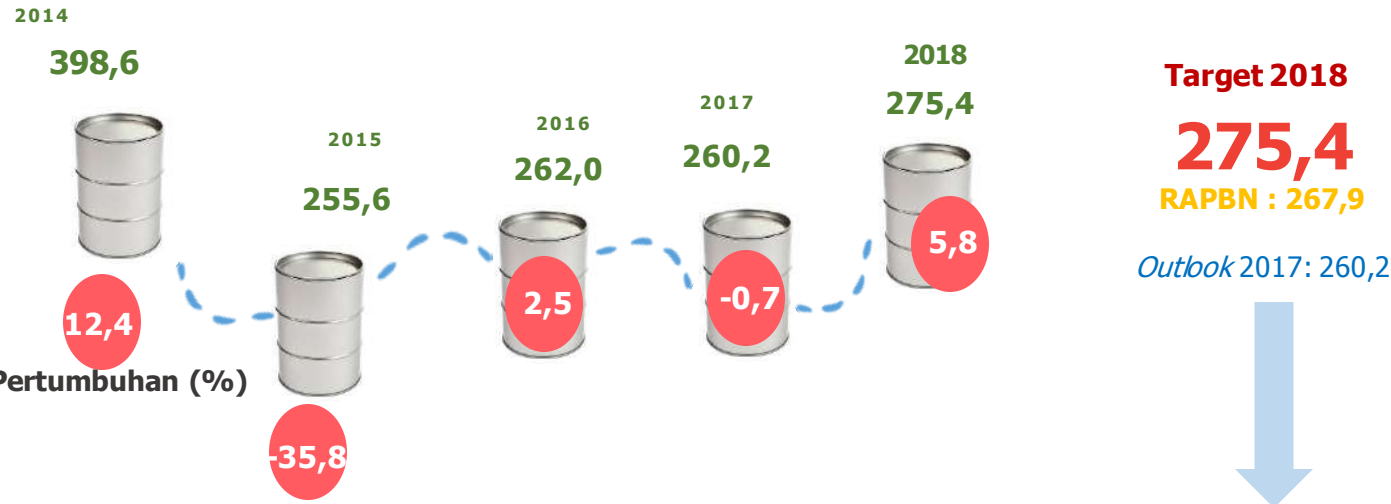
SDM dan regulasi

Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi

PNBP naik Rp7,6 T dari RAPBN tahun 2018 (a.l. SDA Migas Rp3,2 T, SDA non migas Rp1,2 T, dan PNBP lainnya Rp1,8 T)

Didukung Langkah Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan SDA, serta perbaikan pelayanan publik

(triliun rupiah)



Langkah Kebijakan PNBP



Penyempurnaan peraturan

Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP.



Peningkatan Pengawasan pengelolaan

- Penyetoran sesuai penerimaannya
- Penagihan piutang
- Menindaklanjuti hasil audit



Optimalisasi PNBP

- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan SDA
- Peningkatan kinerja BUMN
- Efisiensi operasional PNBP
- Revisi kontrak → efisiensi *cost recovery*
- Menggali potensi baru



Perbaikan Pelayanan Publik

- Transparansi dan kemudahan
- Pemanfaatan IT
- Perbaikan pengelolaan PNBP

Pendapatan SDA

103,7

SDA Migas 80,3

SDA Nonmigas 23,3

Minerba 17,9 Kehutanan 4,2

Panas bumi 0,7 Perikanan 0,6

Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

44,7

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN:

Perbankan 10,9

Non Perbankan 33,8

PNBP Lainnya

83,8

3 K/L Terbesar:

Kemkominfo 15,7

Polri 9,3

Kemenhub 7,3

Pendapatan BLU

43,3

3 K/L dengan Pendapatan BLU Terbesar:

Kemenkeu 13,9

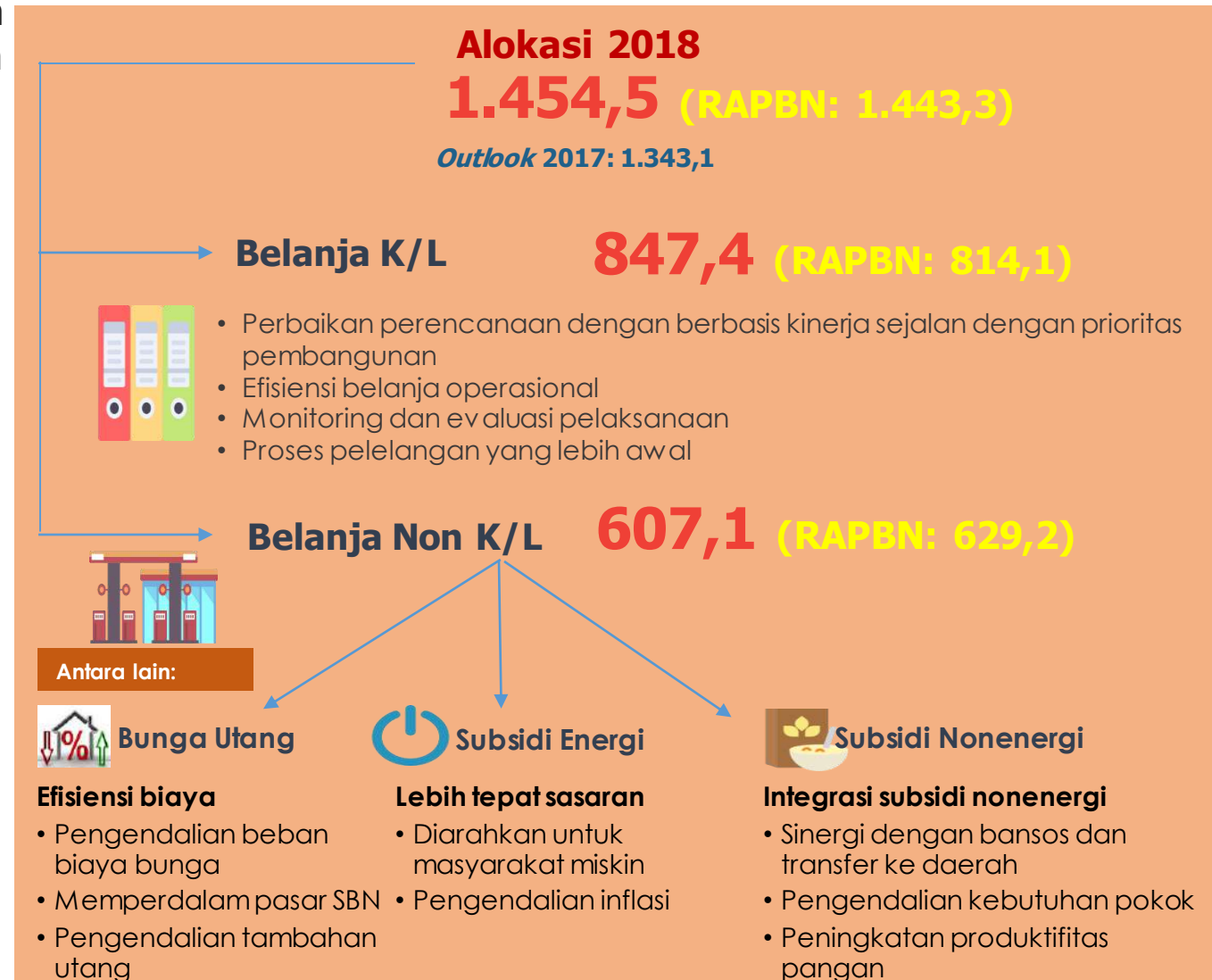
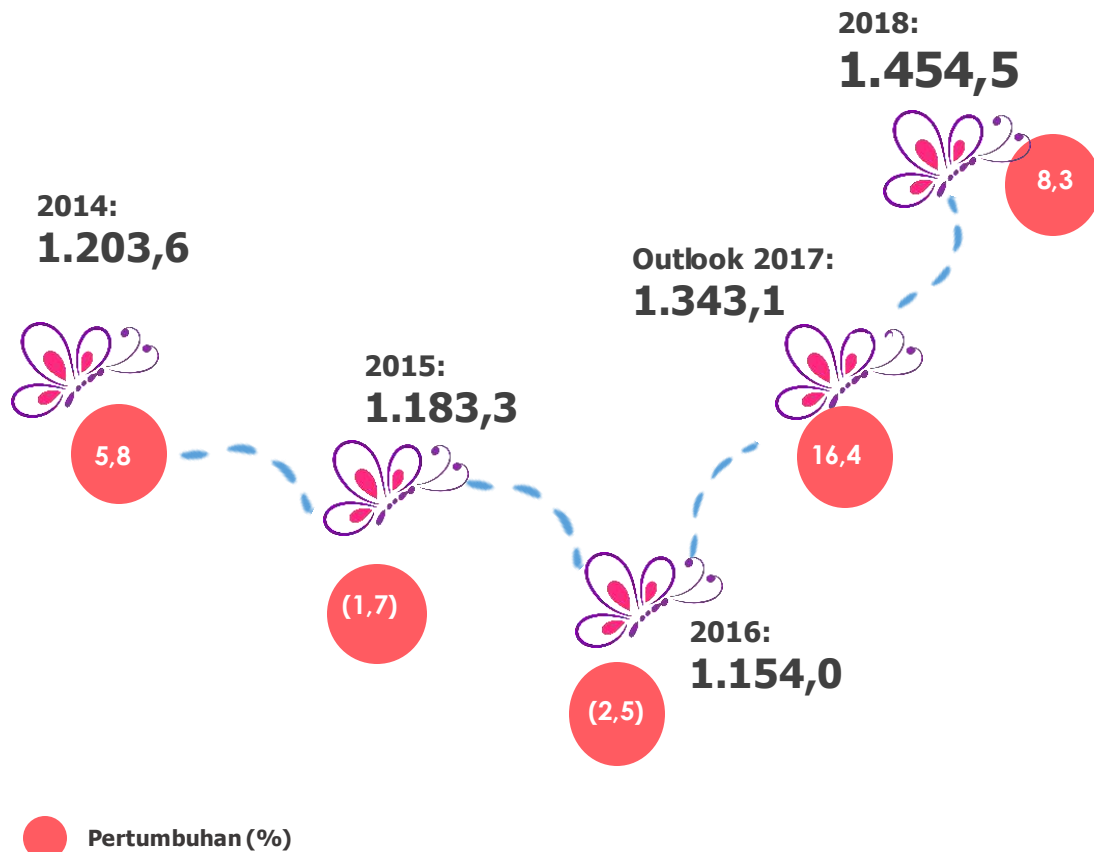
Kemenkes 11,1

Kemenristek Dikti 6,6

Belanja Pemerintah Pusat naik Rp11,2 T dari usulan RAPBN tahun 2018 (kenaikan Belanja K/L Rp33,4 T dan penurunan belanja non K/L Rp22,2 T)

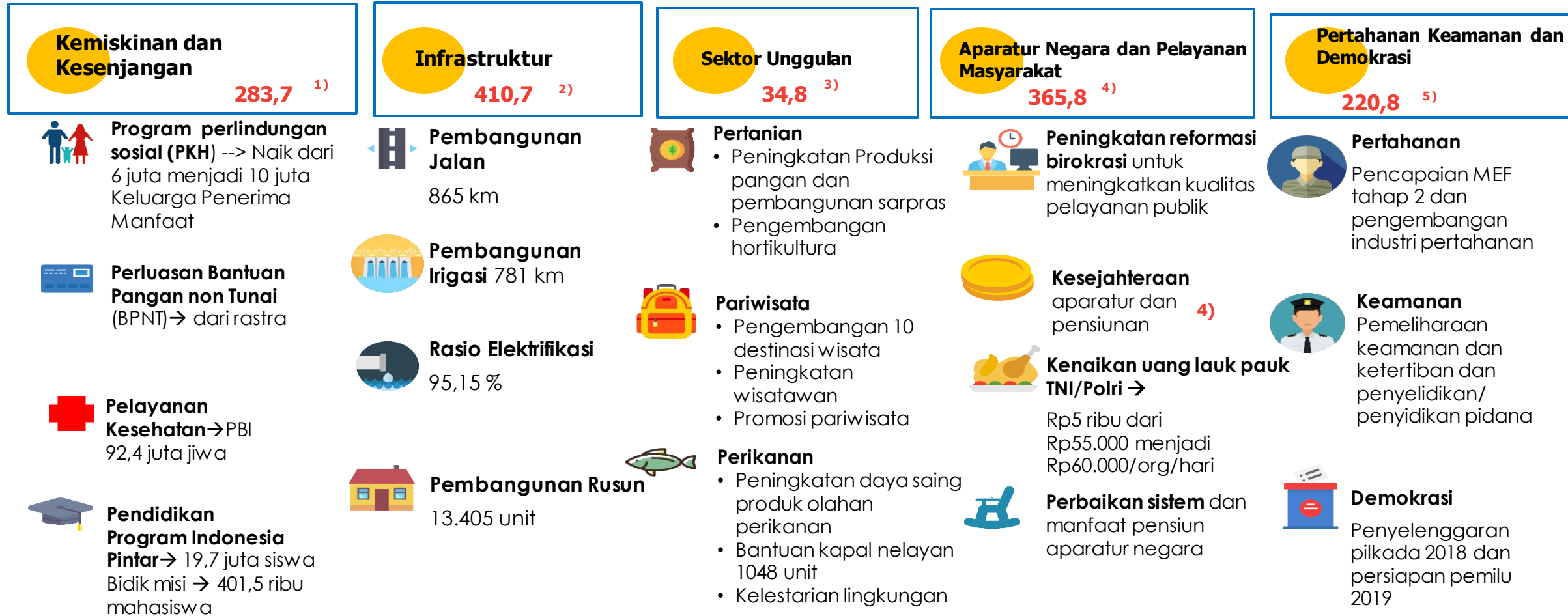
diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas

(triliun rupiah)



Belanja Pemerintah untuk Pembangunan Nasional naik, terutama bidang infrastruktur Rp1,7 T serta bidang pertahanan keamanan dan demokrasi naik Rp19,2 T

(triliun rupiah)



1) Termasuk Dana Desa dan subsidi (di luar subsidi pajak)

2) Angka sementara, termasuk TkDD dan Pembiayaan

3) Alokasi Kementan, KKP, dan Kemenpar

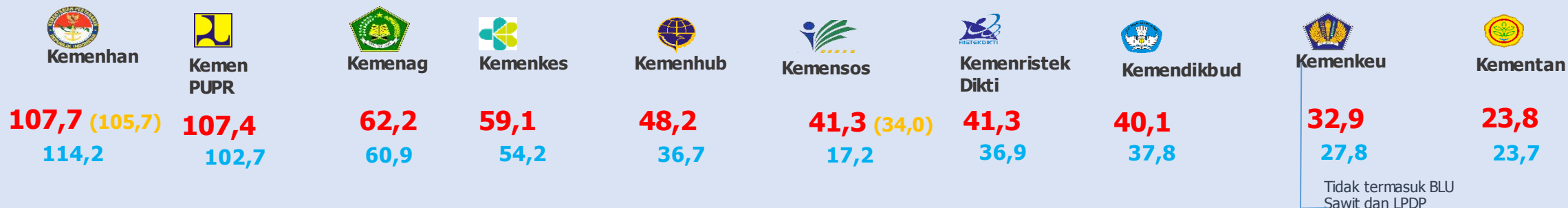
4) Termasuk pensiunan aparat pemda

5) Alokasi Kemenhan, Polri, KPU, dan Bawaslu

Beberapa K/L Mengalami Kenaikan dari RAPBN 2018 yang diusulkan (terutama Kemensos, Kemenhan, Polri, dan BIN)

(triliun rupiah)

Kementerian



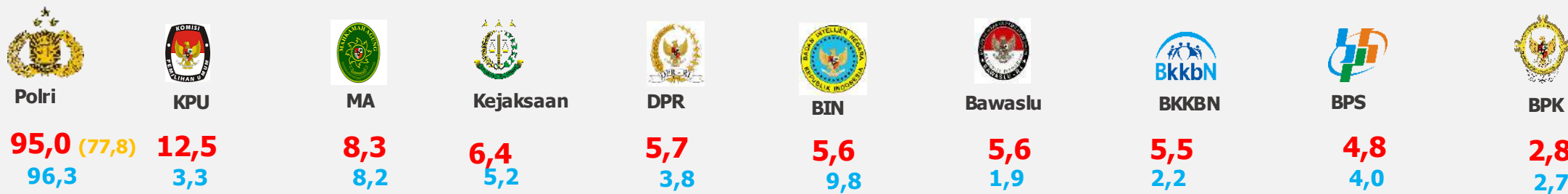
● APBN 2018
● RAPBN 2018

● OUTLOOK 2017



10 K/L Terbesar

Lembaga



Upaya untuk meningkatkan Kualitas belanja pemerintah

Penajaman Prioritas Pembangunan

- Mengacu kepada prioritas dalam **RKP 2018**
- **Koordinasi** antar kegiatan dan stakeholder
- **Penyelesaian** proyek-proyek strategis



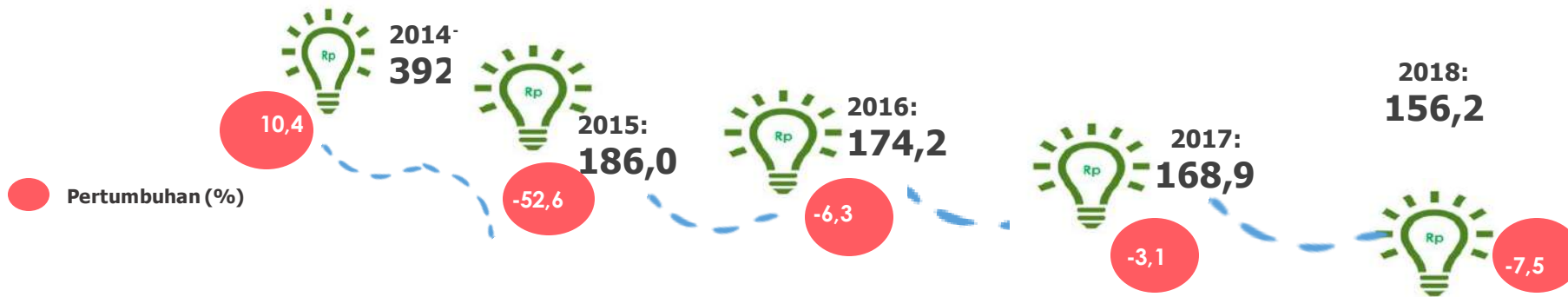
Perbaikan Pelaksanaan Anggaran

- **Pelelangan** lebih awal
- Perencanaan **penganggaran** lebih matang
- Dilakukan monitoring dan **evaluasi** lebih ketat
- Tetap dilakukan **efisiensi** belanja



Subsidi turun sebesar Rp16,2 T dari RAPBN tahun 2018 (subsidi energi turun Rp8,8 T, dan subsidi pangan 7,3 karena peralihan ke bantuan pangan)

- Mendukung pengendalian inflasi;
- Mempertahankan daya beli masyarakat
- Meningkatkan produksi pangan



(triliun rupiah)

Alokasi 2018
156,2
Outlook 2017: 168,9



Subsidi Energi

94,5



Subsidi BBM & LPG

46,9

- Perbaiki penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran
- Subsidi tertutup untuk LPG tabung 3 kg



Subsidi Listrik

47,7

- Subsidi tepat sasaran untuk pelanggan yang belum mampu (450 VA dan 900 VA)



Subsidi Non Energi

61,7

antara lain:



Subsidi Bunga Kredit Program

18,0

- Akses permodalan UMKM
- perumahan bagi MBR



Subsidi Pupuk

28,5

- Penyempurnaan data penerima dengan NIK.
- volume pupuk 9,5 juta ton



PSO

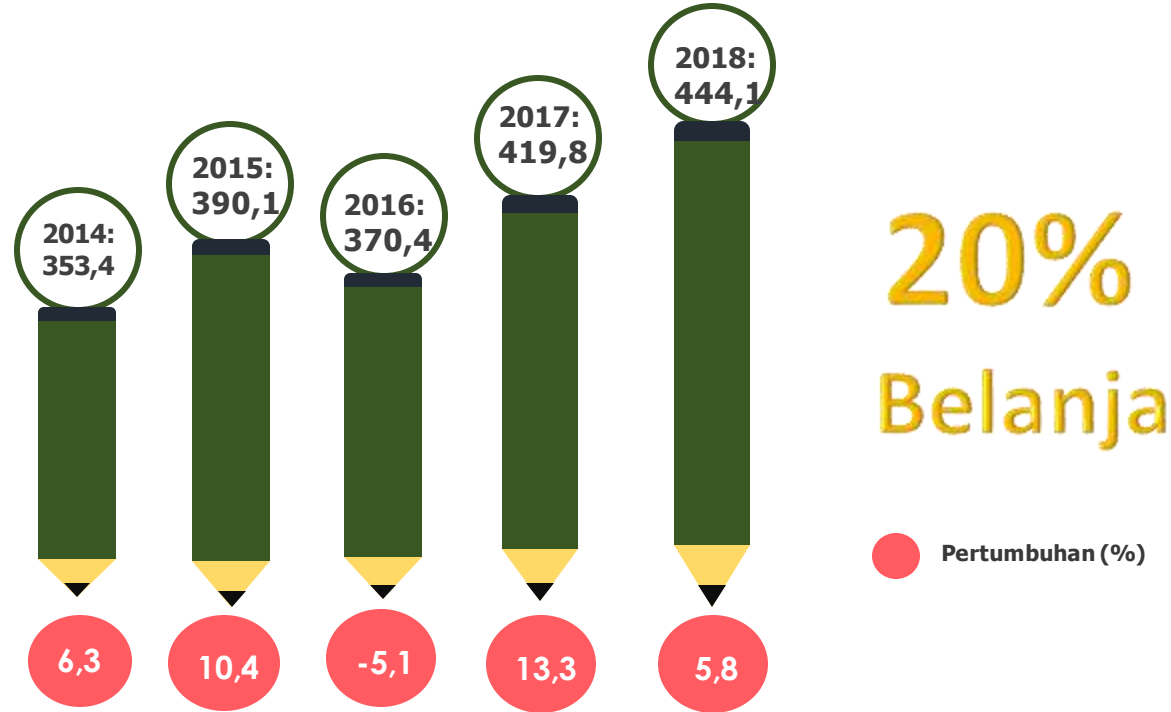
4,4

- Pelayanan publik
- LKBN Antara



Anggaran Pendidikan naik Rp3,2 T dari usulan RAPBN tahun 2018

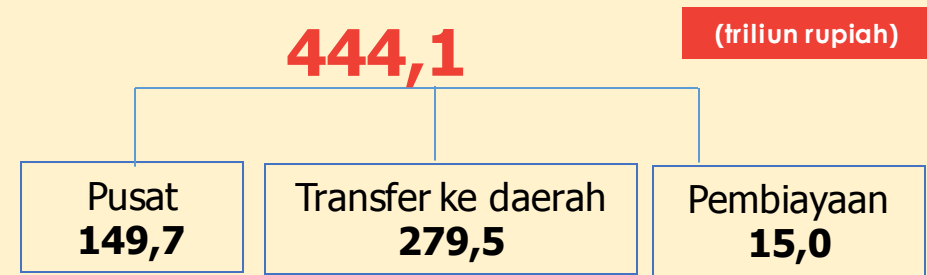
- meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan



Arah kebijakan

- 1.Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.
- 2.Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah.
- 3.Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda.
- 4.Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*).
- 5.Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk *sustainable education*.
- 6.Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.

Alokasi 2018



Sasaran Target (*sementara*)

	Program Indonesia Pintar	19,7 Juta Jiwa
	Bantuan Operasional Sekolah	56 juta jiwa
	Beasiswa Bidik Misi	401,5 ribu mahasiswa
	Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas	61,2 ribu
	Tunjangan Profesi Guru	
	• Non PNS	435,9 ribu guru
	• PNS	257,2 ribu guru
	• PNSD	1,2 juta guru

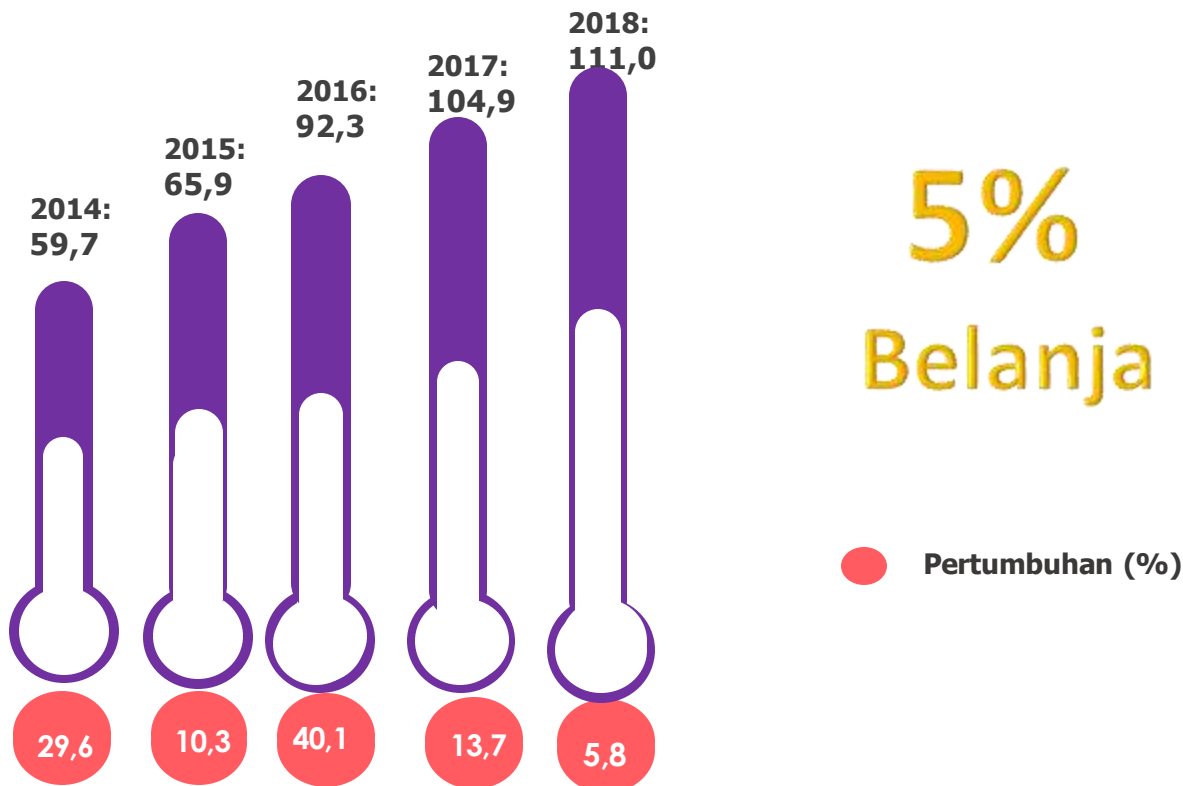
Indikator Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	89,7% 88,1%	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	65,3 % 63,4%
---	----------------	---	-----------------

2017 2018

Anggaran Kesehatan naik Rp0,8 T dari usulan RAPBN tahun 2018

- meningkatkan *supply side* dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga keberlanjutan JKN



- Arah kebijakan**
1. Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan.
 2. Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui.
 3. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN.
 4. Meningkatkan peran Pemda untuk *supply side* dan peningkatan mutu layanan.

(triliun rupiah)

Alokasi 2018

111,0

Pusat

81,5

Transfer ke daerah

29,5

Program Indonesia Sehat

92,4 juta jiwa

Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

1,8 juta orang

Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas

49 RS/Balkes

Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan

92,5%

Sertifikasi obat dan makanan

74,0 ribu

Indikator Kesehatan

Stunting

2017: 28,8%

2018: 29,6%

Persalinan di fasilitas kesehatan

2017: 82%

2018: 81%

Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

2017: 86%

2018: 83%

23

Penanggulangan Kemiskinan dan Dukungan pada Masyarakat Berpendapatan Rendah terus diperkuat

melalui program bantuan sosial, subsidi, dan Dana Desa

(triliun rupiah)

Alokasi 2018
283,7



• **Subsidi *)**
145,5



• **PKH**
17,3



• **Program Indonesia Pintar**
10,5



• **JKN bagi warga miskin/PBI**
25,5



• **Bantuan Pangan**
20,8



• **Bidik Misi**
4,1



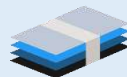
• **Dana Desa**
60,0

*) diluar subsidi pajak

Sasaran (*sementara*)



Program Keluarga Harapan
10 juta RTS



Penerima Bantuan Iuran dalam rangka JKN
92,4 juta jiwa



Program Indonesia Pintar
19,7 juta siswa



Bantuan Pangan
• **15,6 juta** Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- Perluasan Bantuan pangan non tunai (**pengalihan dari subsidi rastra ke bansos**)



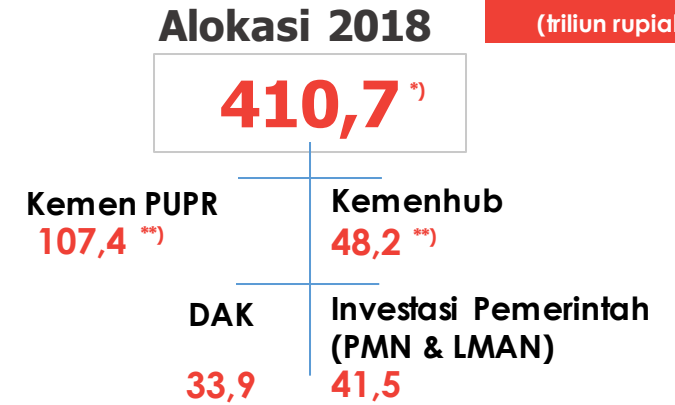
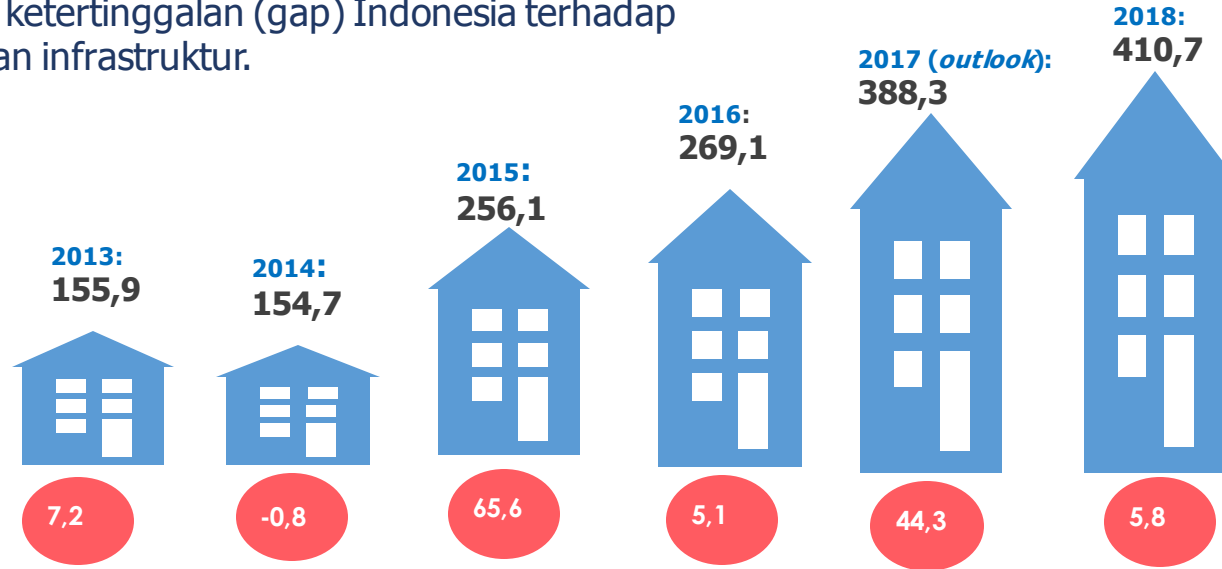
Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
117,7 rb KK



Dana Desa
74.958 Desa

Anggaran Infrastruktur naik Rp1,7 T dari usulan RAPBN tahun 2018 untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas

Mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur.



*) angka sementara

**) total pagu

Pertumbuhan (%)

Sasaran (*sementara*)



Pembangunan dan Preservasi Jalan

- Pembangunan Jalan Baru **865 km**
- Pembangunan jalan tol **25 km**
- Pembangunan Jembatan **8.695 m**



Pembangunan jalur KA

620 km'sp



Pembangunan LRT (lanjutan)

23 km'sp



Pembangunan bandara udara baru

8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)



Informasi dan Telekomunikasi

- Pembangunan desa broadband terpadu **100 lokasi**
- Pembangunan BTS di daerah blankspot, terutama daerah 3T **380 lokasi**

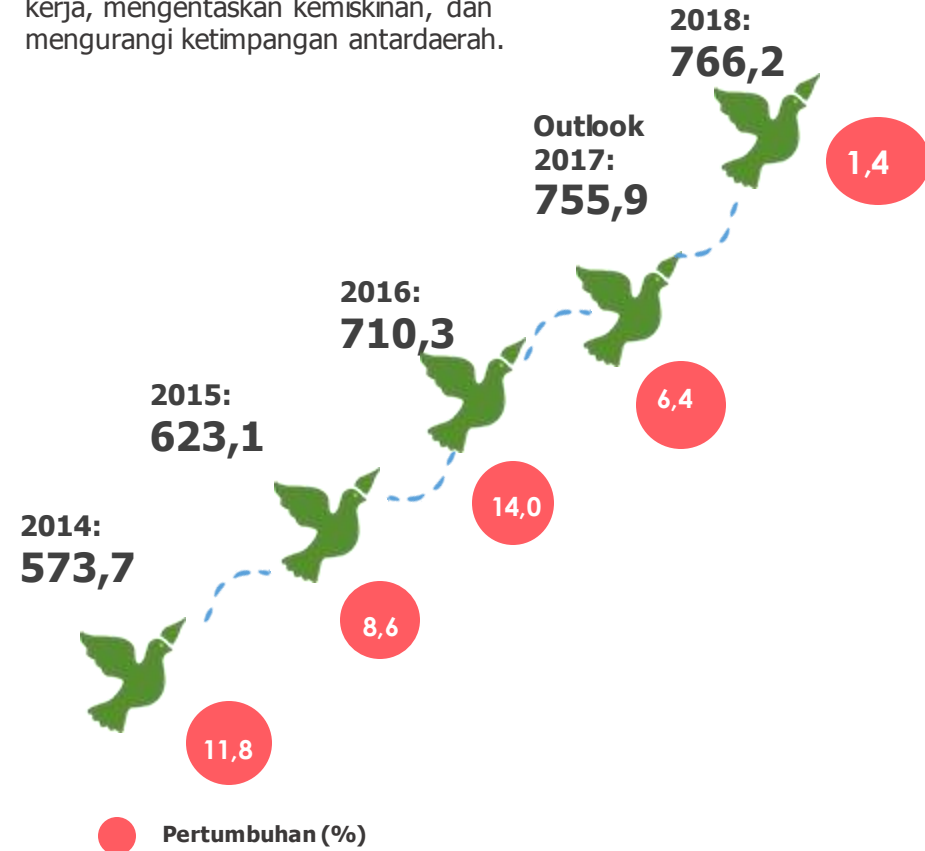


Penyediaan dan Peningkatan kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

- Pembangunan Rusun **13.405 unit**
- Bantuan Stimulan (peningkatan/ pembangunan) **180,0 ribu unit**

Transfer ke Daerah dan Dana Desa naik Rp5,1 T dari RAPBN 2018 karena meningkatnya pendapatan negara yang dibagihasilkan

Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.



(triliun rupiah)

Alokasi 2018
766,2

1. Transfer ke Daerah

706,2

Dana Bagi Hasil

89,2

- Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau;
- DBH Dana Reboisasi (DR) selain utk Rehabilitasi Hutan & Lahan, jg penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan & pembenihan.
- **25% untuk belanja infrastruktur.**

Dana Alokasi Umum

401,5

- Pagu bersifat dinamis;
- Bobot wilayah laut naik menjadi 100%;
- **25% untuk belanja infrastruktur.**

Dana Insentif Daerah

8,5

- Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan.

DAK Fisik

62,4

- Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik;
- Afiriasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

DAK Nonfisik

123,5

- Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah
- **BOS untuk 47,4 juta siswa;**
 - **TPG 1,2 juta guru;**
 - **BOK 9.785 Puskesmas.**

Dana Otsus dan Keistimewaan DIY

21,1

Percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan di Aceh, serta mendukung kewenangan keistimewaan dan pembangunan di DIY.

2. Dana Desa

60,0

- **Melakukan evaluasi pelaksanaan s.d. tahun 2017**
- **Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output**
- **Reformulasi dengan semakin fokus untuk pengentasan kemiskinan, memerhatikan pemerataan dan keadilan:**
 - ✓ Penurunan porsi alokasi yang dibagi merata & peningkatan alokasi formula;
 - ✓ Pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin;
 - ✓ Afiriasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi;
 - ✓ Memperbaiki ketimpangan antardesa dalam alokasi dana desa dengan indeks gini yang rendah.

Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di daerah

(triliun rupiah)

Alokasi 2018
62,4



1. Rehab Ruang Kelas:

SD : 39,2 ribu unit
SMP : 13,4 ribu unit
SMA/K : 5,8 ribu paket

2. Alat peraga dan Buku:

SD : 19,5 ribu unit
SMP : 10,3 ribu unit
SMA/K : 8,8 ribu paket

3. Ruang Kelas Baru:

SD : 5,7 ribu unit
SMP : 4,1 ribu unit
SMA/K : 4,5 ribu paket



Kesehatan

1. Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Puskesmas : 15,7 ribu unit
2. Alat kesehatan: RS dan Puskesmas : 26,4 ribu unit
3. Kefarmasian: 2,3 ribu paket.



Air Minum

1. Penyediaan sumber air minum layak bagi 510,4 ribu rumah tangga.
2. Penyediaan sumber air minum layak bagi 716,4 ribu rumah tangga melalui pembangunan 448 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
3. Penyediaan sumber air minum layak bagi 243,2 ribu rumah tangga.



Irigasi & Pertanian

1. Pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi seluas 51 ribu Ha.
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 771,9 ribu Ha.
3. Perbaikan sumber air 8,2 ribu unit.
4. Jalan Usaha Tani 600 Km.



Perumahan

Fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas 225,8 ribu rumah tangga.



Jalan

Kemantapan Jalan: Provinsi sebesar 73,38% Kab/Kota sebesar 62,88%

Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah.

(triliun Rupiah)

Alokasi 2018 123,5

Bantuan Operasional Sekolah ► Rp46,7 T



Mempercepat pencapaian wajib belajar 12 tahun dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

→ 47,43 juta siswa

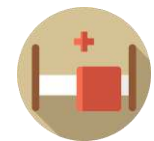
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ► Rp4,1 T



Meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu.

→ 6,18 juta peserta didik

Bantuan Operasional Kesehatan ► Rp8,5 T



Meringankan beban pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif di Puskesmas dan dinas kesehatan.

→ 9.785 Puskesmas

Bantuan Operasional KB ► Rp1,8 T



Operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.

→ 5.157 balai dan 24.312 faskes

Tunjangan Profesi Guru ► Rp58,3 T



Meningkatkan profesionalisme guru.

→ 1,23 juta guru

Tambahan Penghasilan Guru ► Rp1,0 T



Meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru.

→ 265 ribu guru

Tunjangan Khusus Guru ► Rp2,1 T



Memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

→ 50,1 ribu guru

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Ketenagakerjaan (PK2UKM) ► Rp0,1 T



Meningkatkan kapasitas SDM koperasi, usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan.

→ 23.545 peserta dan 1.500 pendamping

Pelayanan Adminduk ► Rp0,8 T



Mendukung penyelenggaraan program dan pelayanan administrasi kependudukan.

→ 34 Prov dan 508 Kab/Kota

Dana Desa

Direformulasi untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dgn memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal dgn jumlah penduduk miskin tinggi

REFORMULASI PENGALOKASIAN :

	2017	2018
 Dialokasikan Berdasarkan : Dengan Bobot (%) :	Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) 90 : 10	AD, Alokasi Afirmasi (AA) dan AF 77 : 3 : 20
 Alokasi Afirmasi :	Tidak Ada	Bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi
 Alokasi Formula : Dengan Bobot (%) :	JP : JPM : LW : IKK 25 : 35 : 10 : 30	JP : JPM : LW : IKK 10 : 50 : 15 : 25
Ratio Ketimpangan distribusi :	0,51	0,49
Dana desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM tinggi	Rp8,4 T Rata-rata/desa Rp0,76 M Alokasi: Min: Rp0,75 M Max: Rp2,06 M	Rp11,3 T Rata-rata/desa Rp1,15 M Alokasi: Min: Rp0,84 M Max: Rp3,42 M

DANA DESA PERKAPITA



Alokasi Rp60 T

PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA



PEMBANGUNAN DESA

Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

PRIORITAS PELAKSANAAN



TENAGA KERJA SETEMPAT



BAHAN BAKU LOKAL



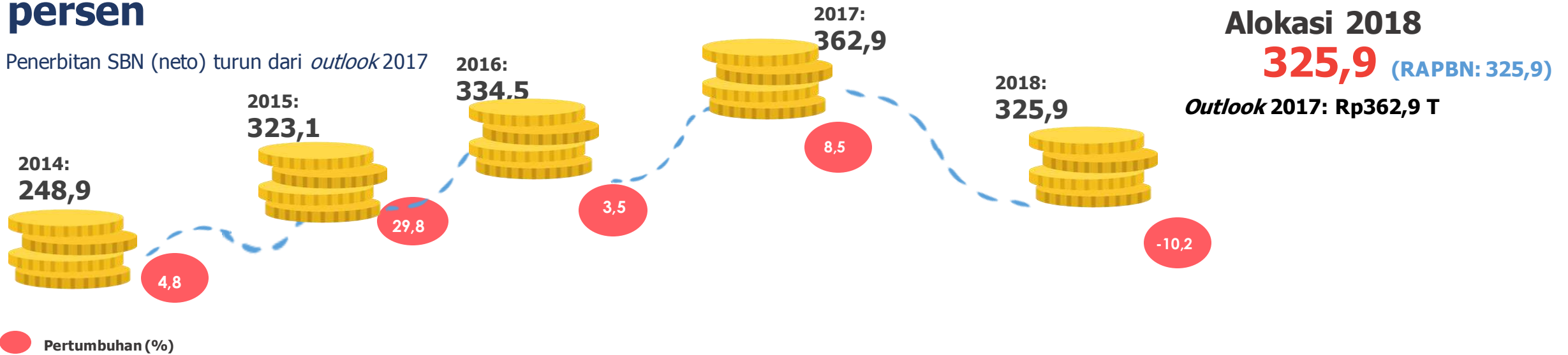
SWAKELOLA

PENYALURAN

Berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output yang dilakukan melalui KPPN setempat.

Pembiayaan Anggaran tetap → menjaga defisit 2,19 persen

Penerbitan SBN (neto) turun dari *outlook* 2017



Pembiayaan Utang **399,2**

- SBN (neto) **414,5** (RAPBN: 414,7)
- Pinjaman (neto) **(15,3)**



Pemberian Pinjaman **(6,7)**

Pinjaman kepada BUMN Pemda (neto)



Pembiayaan Lainnya **0,2**



Pembiayaan Investasi **(65,7)**

- BUMN: **3,6**
- Lembaga Lainnya: **2,5**
- Organisasi/LKI/BUI: **2,1**
- BLU: **57,4**

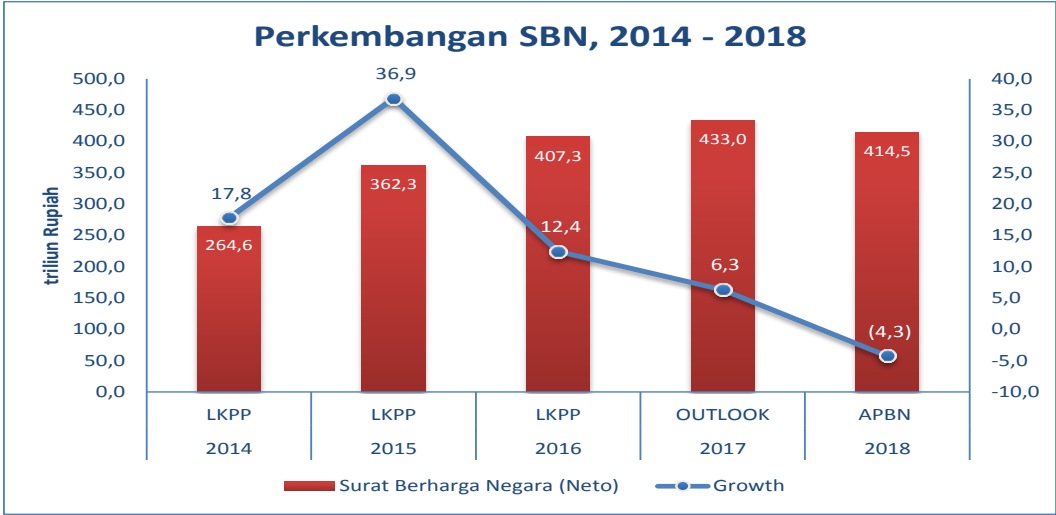


Kewajiban Penjaminan **(1,1)**

Pembiayaan Utang diupayakan turun

- ✓ diarahkan untuk kegiatan:
 - Produktif
 - Efisien
- ✓ dikelola secara hati-hati
- ✓ mempertimbangkan a.l. biaya penerbitan dan risiko pasar keuangan global dan domestik

(triliun rupiah)
Alokasi 2018
399,2



Arah Kebijakan :

Produktif

pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif:
Mengakselerasi prioritas pembangunan nasional,
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur Pembangunan daerah

Efisiensi

Rasio pembayaran bunga utang terhadap *outstanding* utang rendah.

	+ / - 5,0%
	5,6%
	18,0%

Hati-hati

menjaga rasio utang terhadap PDB.

	<30%
	56%
	81%

Strategi :



Menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 30%.



Pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna memenuhi pembiayaan pada tingkat biaya dan risiko yang minimal.



Defisit keseimbangan primer (*primary balance*) turun.

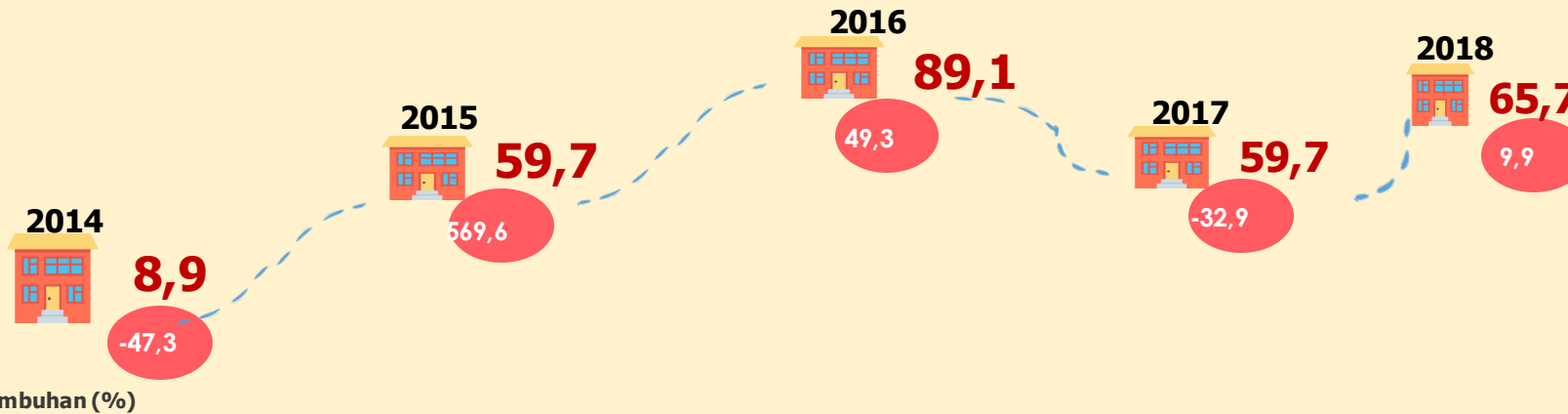


Fokus pada sumber pendanaan dalam negeri.

Pembiayaan Investasi Tahun 2018 untuk mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan kegiatan UMKM

(triliun rupiah)

Alokasi 2018 65,7



BLU LMAN : 35,4
Pembebasan lahan untuk prioritas pembangunan nasional



PMN kepada TAPERA : 2,5
Modal awal pembentukan BP Tapera



Dana Bantuan Internasional 1,0
Pengelolaan dana dan pemberian bantuan internasional



Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN): 15,0
Peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan



BLU Perumahan (PPDPP) : 2,2
Peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan bagi MBR



BLU Perikanan (LPMUKP) : 0,9
Penguatan modal usaha kelautan dan perikanan



PMN untuk PT KAI : 3,6
Mendukung pembangunan infrastruktur transportasi



BLU PIP: 2,5
Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif



BLU Kehutanan (P2H) : 0,5
Pembiayaan kepada UMKM untuk industri ramah lingkungan

KESIMPULAN



Menjaga Momentum Ekonomi tahun 2018

Menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.



Menjaga kepercayaan masyarakat

pelayanan pemerintah dan birokrasi yang lebih baik.



Penerimaan Negara diperkuat

Didukung langkah-langkah reformasi yang solid dan terukur.



Defisit APBN 2018 terjaga dan Utang yang Terukur

menjaga *fiscal sustainability* dan pengelolaan utang yang transparan dan akuntabel



Belanja Negara lebih Fokus

untuk pemerataan pembangunan, penyelesaian proyek strategis, dan perlindungan kepada masyarakat menengah ke bawah.

**TERIMA
KASIH**

